

## Bawaslu: Tak Ada Temuan yang Bisa Batalkan Hasil Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menegaskan bahwa pihaknya tak yakin bisa membatalkan hasil Pemilu 2024.

Bawaslu mengakui banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024.

Namun, Bagja menuturkan, pembatalan hasil Pemilu 2024 bisa saja terjadi jika temuan-temuan di lapangan pada penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) yang masih terus dilakukan.

"Pada titik ini tidak ada temuan Bawaslu yang bisa menyatakan bisa kemudian mengambil kesimpulan demikian (batalkan hasil pemilu), tapi tergantung juga hasilnya dari penyelenggaraan PSU (pemungutan suara ulang) kemudian juga temuan-temuan di lapangan kita yang masih dilakukan," ucap Bagja saat

ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jumat (23/2). "Namun pada titik ini, apakah itu akan menghasilkan, ada yang namanya pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis dan masif) di badan pengawas Pemilu," katanya.

Bagja mengungkapkan, banyak kriteria kolektif yang dipenuhi menjadi persyaratan yang akan mempengaruhi hasil Pemilu 2024. Hal itulah yang nantinya bisa dibuktikan dan termasuk jalur untuk pengaduan ke Bawaslu.

"Itulah yang kemudian apakah bisa dibuktikan dan itu termasuk dalam jalur dalam keberatan atau juga permohonan di Bawaslu untuk mengadakan hal demikian. Kami dalam UU dan peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu yang demikian ada," tadanya. ●han

## Pengajian Ustadz Syaifiq Basalamah Dibubarkan Banser, Jamaah Ricuh

SURABAYA (IM) - Pengajian ustadz Syaifiq Riza Basalamah di Surabaya, Jawa Timur, ricuh. Beberapa jamaah terlibat adu jotos saat sejumlah anggota Barisan Ansor Serba Guna (Banser) datang membubarkan.

Sejumlah anggota Banser mendatangi Masjid As-Salam di Perumahan Puri Mas Gunung Anyar Surabaya, dan menghentikan pengajian ustadz Syaifiq Riza Basalamah.

Penghentian paksa ini memancing emosi jamaah peserta pengajian, hingga terjadi adu mulut. Aksi saling dorong dan adu pukulan antara jamaah peserta pengajian dengan Banser pun

tidak terhindarkan.

Untungnya, keributan ini tidak berlangsung lama, setelah kedua belah pihak meredakan diri. Diburkannya pengajian ustadz Syaifiq Riza Basalamah, karena dituding pengajian membawa ujaran kebencian.

"Kami menolak segala bentuk ujaran kebencian yang disebar di wilayah kami," kata Ketua PAC GP Ansor Gunung Anyar Surabaya, Asyiqun Nahdli.

Dengan kejadian tersebut, penyelenggara pengajian yang digelar Kamis petang kemarin ini, akhirnya menghentikan dan membatalkan kegiatan pengajian. ●mei



AKSI MASSAL PUNGUT SAMPAH PLASTIK DI PALU Prajurit TNI memungut sampah yang terselip di antara bebatuan pada aksi massal pungut sampah plastik di Pantai Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (23/2). Aksi yang diinisiasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dan diikuti 3.500 warga dari berbagai unsur termasuk TNI, Polri, OPD, mahasiswa, pelajar, pekerja padat karya, dan pegiat lingkungan dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional sebagai bentuk dukungan pencapaian target pengurangan sampah plastik nasional oleh pemerintah.

## Kubu Siskaece Protes Hakim Usai Tim Bidkum Polda Metro Bisik-bisik ke Ahli

JAKARTA (IM) - Tim penasihat hukum Fransiska Candra Novita Sari alias Siskaece memprotes majelis hakim usai tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya berbisik-bisik dengan ahli, saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (23/2).

Momen bisik-bisik itu terekam ketika kubu Siskaece sedang melakukan tanya jawab dengan Kombes Purn Warasman Marbun, ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana.

Saat itu, kubu Siskaece tengah menanyakan salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ahli mengaku kurang ingat dengan pasal yang ditanyakan.

Bidkum Polda Metro selaku pihak yang menghadirkan ahli mencoba

membantu Warasman untuk mengingat pasal tersebut.

Salah satu tim bidkum Polda Metro mencoba membisikkan sebuah pasal kepada Warasman sambil bergumam.

Melihat hal itu, kubu Siskaece langsung memprotes aksi yang dilakukan kubu Polda.

"Izin Yang Mulia, kami berkeberatan jika termohon melakukan bisik-bisik kepada ahli," ujar kubu Siskaece.

Majelis hakim kemudian mencoba menengahi dengan meminta Warasman agar tidak menengok ke arah kanan ketika tanya jawab dengan Pemohon.

"Saudara ahli, tidak usah menengok ke kanan. Menengok ke arah kiri atau ke arah saya, ke depan, ya," ungkap hakim. ●mei

# 2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



## PERTEMUAN ANIES DENGAN PETINGGI PARTAI KOALISI PERUBAHAN

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bersama Cawapres sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Partai NasDem Surya Paloh (ketiga kanan), Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri (kedua kanan), Presiden PKS Ahmad Syaikh (kiri), dan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (23/2). Pertemuan itu untuk mendukung bergulirnya hak angket di parlemen jika diduga terjadi pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu 2024.

## TKN Menganggap Wajar Jika Jokowi Ikut Terlibat Menyusun Kabinet Prabowo-Gibran

Meski Prabowo dan Gibran berwenang penuh tentukan menteri-menterinya. Namun Jokowi dinilai akan memiliki peran yang signifikan.

JAKARTA (IM) - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko, menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebab diketahui bahwa Prabowo punya semangat

untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi. Sebab itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran.

"Karena semangatnya melanjutkan, saya pikir Pak Jokowi akan punya posisi yang mungkin lebih sifatnya penasihat, advisory. Saya kira itu wajar-wajar saja," ujar Budiman saat ditemui di Tebet,

Jakarta Selatan, Jumat (23/2).

Sementara itu, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan, Prabowo dan Gibran memiliki kewenangan penuh untuk menentukan menteri-menteri yang akan membantu kerjanya. Namun, Drajad meyakini Jokowi pasti akan memiliki peran yang signifikan.

"Itu sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi karena program Prabowo-Gibran melanjutkan program Pak Jokowi, tentu peranan beliau akan signifikan," kata Drajad saat dikonfirmasi terpisah.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran disebut sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Jokowi, meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.

"Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai," kata Drajad, Kamis (22/2).

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perkecono-

mian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Drajad menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi, lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

"Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berupa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada," ujar Drajad. ●han

## Kejagung Telah Tunjuk 15 Jaksa Peneliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

JAKARTA (IM) - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, telah menunjuk 15 jaksa peneliti untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Panji Gumilang.

Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas kasus TPPU Panji Gumilang, baru-baru ini.

"Jampidum menunjuk 15 orang Jaksa peneliti untuk meneliti berkas dan menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum secara formil maupun materiil," ujar Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya, Jumat (23/2).

Sebari menunggu proses pemeriksaan kelengkapan berkas perkara rampung, jaksa peneliti akan

terus bekoordinasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Sehingga, bila nantinya ditemukan kekurangan di setiap bagian berkas perkara bisa langsung disampaikan ke penyidik.

"Selama dalam penelitian berkas perkara dan untuk mengefektifkan waktu yang diberikan oleh Undang-undang, Jaksa Peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan," kata Ketut.

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara atau tahap satu kasus dugaan TPPU Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung, pada 21 Februari. 2024.

Dalam kasus TPPU ini, Panji Gumilang disebut menggunakan modus meminjam uang ke Bank J-trust atas nama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).

Kemudian, uang itu justru digunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp73 miliar.

Dana pinjaman itu oleh Panji Gumilang dipindahkan dari rekening yayasan ke rekening pribadi. Kemudian, digunakan untuk kepentingannya.

Dari hasil pendalaman, Panji diketahui menggunakan uang yayasan untuk membayar cicilan pinjaman tersebut.

Panji Gumilang disangka melanggar Pasal 372 KUHIP tentang penggelapan. Kemudian, Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Terakhir, Panji Gumilang juga diduga melanggar Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU. ●han

## KPK Menduga Ada Pemberian "Fee" pada Proyek Jalur Kereta di DJKA

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, ada pemberian uang atau fee dan pengondisian temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kasus suap proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Dugaan ini pun didalam ketika memeriksa empat aparat sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/2).

Keempatnya adalah Yunnanda, Achyar Pasaribu, Zulkarnain, dan Anton Aprianto.

"Para saksi dikonfirmasi antara lain kaitan beberapa proyek pekerjaan yang ada di DJKA Kemenhub yang diduga ada pemberian uang berupa fee dan pengondisian hasil audit BPK atas pengadaannya tersebut," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (23/2).

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua orang ASN dari Kemenhub dan BPK sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek jalur kereta di DJKA. Kendati demikian, lembaga antirasuah itu belum menjelaskan secara rinci identitas ASN di Kemenhub dan BPK yang menjadi tersangka baru tersebut.

Pengumuman identitas tersangka bakal diungkap bersamaan dengan penjelasan peran masing-masing pada saat KPK melakukan upaya paksa penahanan.

Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenhub

Novie Riyanto, sebagai saksi untuk dua tersangka baru tersebut. Sekjen Kemenhub itu diperiksa penyidik KPK pada Kamis (18/1), untuk mendalami dugaan pengondisian temuan BPK terkait proyek di DJKA.

Novie Riyanto dikonfirmasi terkait dugaan adanya lelang yang dikondisikan agar dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Dikonfirmasi terhadap saksi atas dugaan adanya pengaturan para pemenang lelang, termasuk pengondisian temuan audit BPK," kata Ali pada 22 Januari 2024.

Saa memeriksa Novie, tim penyidik juga menelisik dugaan penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk menangani beberapa pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenhub.

Terkait perkara ini, KPK telah menetapkan 14 orang tersangka, termasuk dua tersangka baru yang identitasnya belum diumumkan. Tujuh tersangka yang masih diproses di KPK, yakni Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugianto; Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi; dan PPK Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah. ●han



## GIBRAN DATANGI RUMAH PRABOWO

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming tiba di kediaman Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan di Jakarta, Jumat (23/2).